

RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

KABUPATEN BUOL



dinaspemdesbuol@gmail.com





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL
NOMOR: 900/70.09/DPMD/2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Buol Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2023 Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUOL TAHUN 2025
- KESATU : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN
 2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Buol
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Kepala Dinas DPMD Kabupaten Buol



Abd. Yuni L. Saad, S.Sos
Nip. 19651017 198303 1 017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025 berisi tentang rencana implementatif dari Rencana Strategi (Renstra) DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dan merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh jajaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berisikan rencana dan tindakan strategis yang memuat program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PMD Kabupaten Buol dapat terlaksana dengan optimal.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dan dapat menjadi motivator bagi jajaran personil Kabupaten Buol dan stakeholder yang ada untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Buol yang semakin sejahtera.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja ini, atas saran serta masukan yang positif serta membangun.

Buol, 16 Juli 2024



Kepala Dinas

ABD. YANI L. SAAD, S.Sos
NIP. 19651017 198303 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3APMD TAHUN LALU....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3APMD Tahun 2020 dan Capaian Renstra DP3APMD	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3APMD	33
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3APMD	34
2.3.1 Pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol	34
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi DP3APMD Kabupaten Buol... ..	34
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi Dn misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional	38
2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DP3APMD Kabupaten Buol	39
2.3.5 Rekomendasi strategis dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2022	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DP3APMD	52
3.1... Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2... Tujuan dan Sasaran Renja DP3APMD	53

3.2... Tujuan dan Sasaran Renja DP3APMD.....	53
3.3... Program dan Kegiatan.....	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP3APMD	63
BAB V PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DP3APMD dan Pencapaian Renstra DP3APMD S/D Tahun 2023 Kabupaten Buol	17
2.2 Pencapaian Kinerja DP3APMD Kabupaten Buol.....	33
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Buol.....	43
2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	51
3.1 Rumusan Rencana program dan kegiatan DP3APMD Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Kabupaten Buol.....	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

RKPD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA), disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPD Kabupaten Buol. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2025 meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintah Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Desa.

b. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan RKPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap Perangkat Daerah hendaknya harus tanggap terhadap perubahan-perubahan dengan jenjang perencanaan yang meliputi:

- Perencanaan Jangka Panjang
- Perencanaan Jangka Menengah dan
- Perencanaan Jangka Pendek atau Tahunan

Selama tahun 2023-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol secara bertahap diharapkan mampu mencapai target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja yang dijabarkan dalam tahun anggaran berjalan yaitu pada tahun 2023-2026 sehingga pada tahun 2025 mendatang, pembangunan akan menjadi lebih meningkat atau bisa tercapai sesuai target dalam RPD maupun dalam Renstra.

Penyusunan RKPD berdasarkan pada data statistik hasil pencapaian pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang nantinya akan dibawa dan dibahas dalam forum penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Dalam penyusunan RKPD, prosesnya harus diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan diprovinsi maupun yang ada dipusat, sehingga dalam pengembangan sistem demokrasi yang sehat serta peningkatan sistem pelayanan terhadap masyarakat maupun profesionalisme aparatur pemerintah akan terjalin dengan baik. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang, sehingga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mengoperasionalkan rencana kerja yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam melaksanakan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan Renja
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berpedoman pada Renstra DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, evaluasi hasil renja tahun lalu, dan evaluasi hasil renja tahun berjalan.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buol nomor 050/02.10/BAPPEDA-LITBANG Tanggal 08 Januari Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

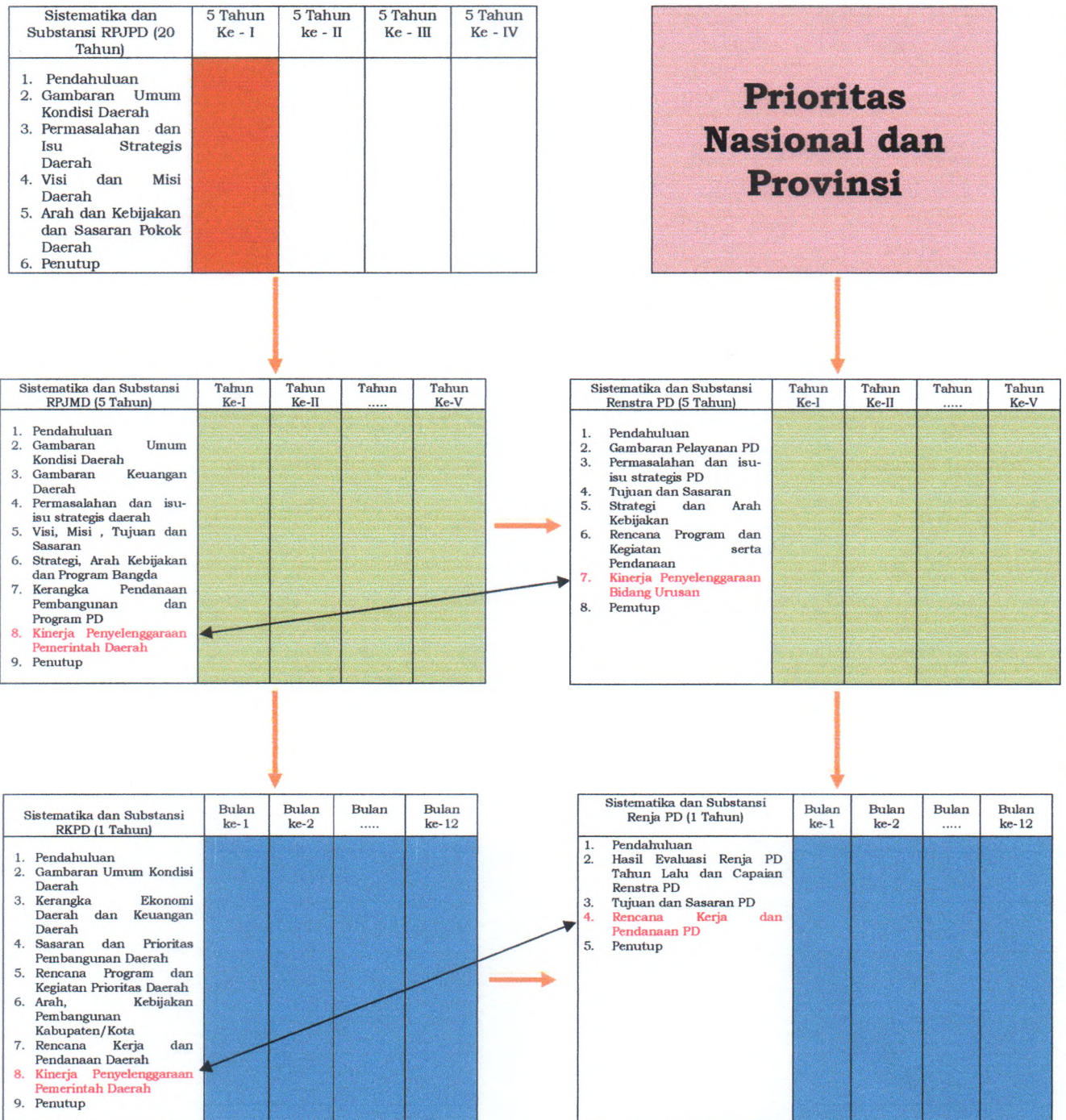
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja
 - 6) Verifikasi Rancangan Akhir Renja
- c. Keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, karena dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Dalam keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional

Keterkaitan dokumen Renja PD dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan dalam bagan berikut ini :

Gambar 1.1 Keterkaitan dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD, 6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, 7. paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

d. Proses penyusunan RAPBD

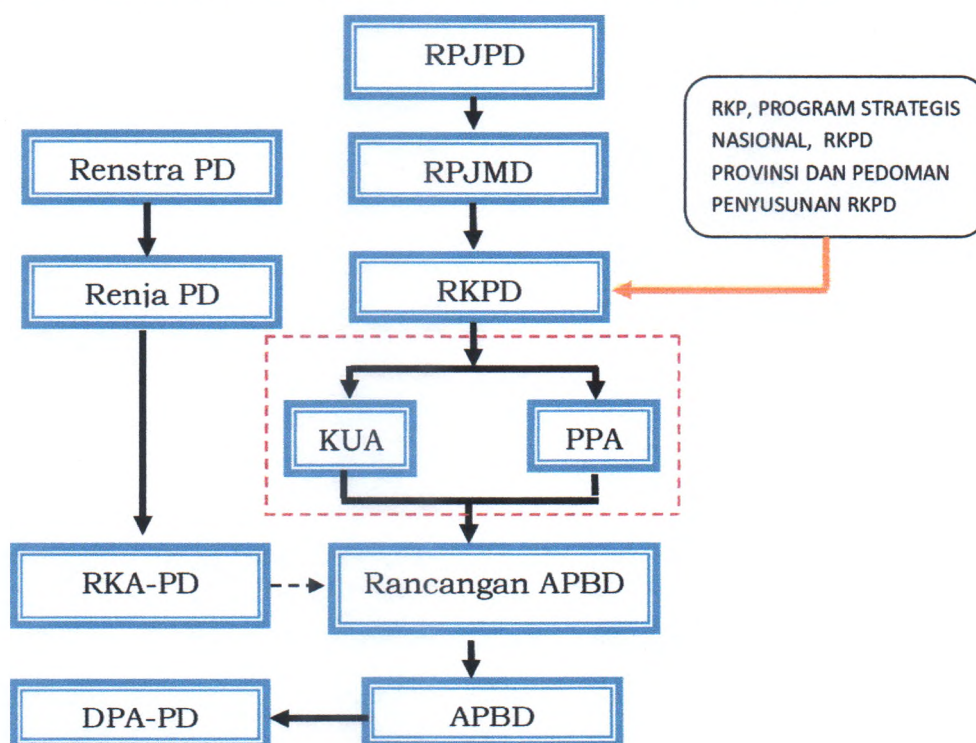
Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja DP3APMD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Buol Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2023 Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan RPD Kabupaten Buol Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan. Selain itu untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta RPD Kabupaten Buol di tahun 2025. Selain itu sebagai instrument akuntabilitas kinerja ditahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Laporan Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja DP3APMD yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3APMD TAHUN 2023

Bab ini menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sub bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional berdasarkan RKP Tahun 2024.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2026. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target Tahun 2025.

1.3. Program dan Kegiatan

Sub Bab ini memuat program dan kegiatan yang diuraikan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, sehingga Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2023 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, serta hasil pelaksanaan program/kegiatan.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan ditahun-tahun mendatang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol merupakan perangkat daerah yang melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan. Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol melaksanakan 7 Program, 15 Kegiatan dan 28 sub kegiatan yang terdiri dari 1 program, 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan sebagai penunjang dan 6 program 14 kegiatan 15 sub

kegiatan sebagai pelaksana pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 6.064.391.091 dan terealisasi sebesar Rp 5.992.427.823 atau 98,81 %. Sisa anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp 71.963.268.

Adapun rincian dari program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

Evaluasi Program Tahun Anggaran 2023

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Program Perlindungan Perempuan	326.818.900	322.241.850	98,6
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	312.601.626	310.198.170	99,2
Program Perlindungan Khusus Anak	571.181.100	564.776.050	98,9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.069.720.290	4.050.190.203	99,5
Program Peningkatan Kerja sama Desa	2.670.000	2.670.000	100
Program Administrasi Pemerintahan Desa	778.239.175	745.021.550	95,7
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.160.000	3.109.000	98,4
TOTAL	6.064.391.091	5.992.427.823	98,81

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal yaitu 1). Kebijakan perencanaan program dan kegiatan; 2).

Pelaksanaan rencana program dan kegiatan; 3). Hasil rencana program dan kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain:

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari seluruh program/kegiatan, semuanya dapat mencapai target yang direncanakan dan tidak ada program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan

Hampir semua program dapat memenuhi target yang direncanakan. Jika terdapat kekurangan capaian hal ini dikarenakan perbedaan satuan harga sehingga menyebabkan setiap kegiatan menyisakan sedikit anggaran yang jumlahnya tidak signifikan dan tidak mempengaruhi pencapaian target yang direncanakan.

c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023.

d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja

program/kegiatan, karena anggaran yang tidak mencukupi untuk mendukung pelaksanaan target kinerja di beberapa program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol khususnya pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian target kinerja yang tidak terpenuhi/tercapai berimplikasi negative terhadap Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang telah disusun dan sebaliknya. Tahun 2023 adalah tahun pertama dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Diperiode pertama, capaian masih sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tertentu

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah penambahan anggaran terhadap beberapa program/kegiatan khususnya urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga mengarah pada pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra sampai dengan tahun 2024 untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DP3APMD dan
Pencapaian Renstra DP3APMD s/d Tahun 2024
Kabupaten Buol

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.01	Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pd lembaga pemerintah kewenangan kab./kota	Terlaksananya kegiatan PKK	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Kegiatan PKK	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan	100 %	100 %	100 %	100 %	1	-	-	-

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	1	-	-	-
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	1	-	-	-
	Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	60 Kasus	71 Kasus	-	-		-	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan pendampingan perempuan korban kekerasan	60 Kasus	71 Kasus	-	-		-	-	-

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.03.01	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendampingan terhadap Perempuan Korban Kekerasan	60 Kasus	71 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	1	-	-	-
2.08.03.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan	60 Kasus	71 Kasus	60 Kasus	60 Kasus	1	-	-	-
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	50 %	100 %	100 %	100	1	-	-	-
2.08.04.2.01	Peningkatan kualitas keluarga kesetaraan gender (KG) dan hak anak tk. Daerah kab./kota	1) Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. 2) Jumlah Kelompok Keluarga yang dibina (2023)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Kelompok	100 Kelompok	1	-	-	-

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.04.2.01.03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab./kota	1) Jumlah kelompok keluarga yang di bina 2) Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota (2023)	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Dokumen	10 Dokumen	1	-	-	-
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	1	-	-	-
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1	-	-	-
2.08.07.2.01.02	Advokasi kebijakan dan pengembangan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	-	-	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	1	-	-	-

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.07.2.02	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tk. Daerah kab./kota	1) Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus 2) Layanan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (2023)	60 Kasus	39 Kasus	95 Kasus	95 Kasus	1	-	-	-
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Jumlah Layanan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2) Jumlah Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota (2023)	60 Layanan Pendampingan	60 Layanan Pendampingan	65 Layanan tindak lanjut	65 Layanan tindak lanjut	1	-	-	-

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisas Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Lembaga Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	60 Layanan	39 Layanan	100 Layanan	100 Layanan	1	-	-	-
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	60 Dokumen	39 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	1	-	-	-
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 %	100 %	100 %
2.13.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-		10 Dokumen	17 Dokumen	100 %

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BUOL

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1) Dokumen Renstra, Renja serta BAP Musrembang Tk. Kecamatan/Kab./Prov. 2) Jumlah dokumen perangkat daerah (2023)	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-		10 Dokumen	17 Dokumen	100 %
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan 2) Daftar gaji dan tunjangan (2023)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	1	12 Bulan	12 Bulan	100 %
2.13.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1) Daftar gaji dan tunjangan 2) Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (2023)	12 Dokumen	12 Dokumen	38 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	1	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	100 %
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1) SPPD dan SPJ 2) Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (2023)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BUOL

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Jumlah kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang terlaksana 2) Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kantor (2023)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-		-		
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	-	-		-		
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Jumlah layanan administrasi umum barang dan jasa 2) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (2023)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	10 Unit	10 Unit	1	10 Unit	20 Unit	100 %
2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1) Alat listrik/instalasi 2) Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	10 Paket	10 Paket	1	4 Paket	14 Paket	100 %

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	2 Unit	1 Paket	1 Paket	1	4 Paket	5 Paket	100 %
2.13.01.2.06.03	Penyedia peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Unit	3 Unit	10 Paket	10 Paket	1	11 Paket	21 Paket	100 %
2.13.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	15 Unit	15 Unit	10 Paket	10 Paket	1	15 Paket	25 Paket	100 %
2.13.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan barang penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	22 Lembar	22 Lembar	25.000 Lembar	25.000 Lembar	1	50 Paket	50 Paket	100 %
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Keikutsertaan pada kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Kegiatan	12 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	1	20 Laporan	20 Laporan	100 %
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi umum barang dan jasa	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1	12 Bulan	12 Bulan	100 %

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	45 keg./dokumen	45 keg./dokumen	-	-		-	-	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1) Struk pembayaran telepon, internet, air dan listrik 2) Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (2023)	12 dokumen	12 dokumen	12 Laporan	12 Laporan	1	12 Laporan	12 Laporan	100 %
2.13.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1) Jasa perbaikan peralatan kantor 2) Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (2023)	7 Unit	7 Unit	12 Laporan	12 Laporan	1	12 Laporan	12 Laporan	100 %
2.13.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1) Jasa pelaksanaan administrasi keuangan 2) Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	35 orang	35 orang	12 Laporan	12 Laporan	1	12 Laporan	12 Laporan	100 %

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah 2) Pajak kendaraan bermotor (2023)	9 Unut	9 Unut	10 Unit	10 Unit	1	10 Unit	10 Unit	100 %
2.13.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1) Pajak kendaraan bermotor 2) Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	9 unit	10 Unit	10 Unit	1	10 Unit	10 Unit	100 %
2.13.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1) Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan 2) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (2023)	8 unit	8 unit	10 Unit	10 Unit	1	10 Unit	10 Unit	100 %
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Cakupan kerja sama antar desa	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 %	100 %	

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	108 desa	108 desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1	108 desa	108 desa	100 %
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan	1) Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk 2) Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan (2023)	108 desa	108 desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Organisasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 %	100 %	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa	108 Dokumen	108 Dokumen	108 Dokumen	108 Dokumen	1	108 Dokumen		100 %
02.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	108 Desa	108 Desa	-	-		108 Desa	108 Desa	100 %
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengeloaan keuangan desa	108 Dokumen	108 Dokumen	108 Dokumen	108 Dokumen	1	108 Dokumen	108 Dokumen	100 %

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BUOL

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga kerja sama antar desa	1) Jumlah desa yang mengikuti pelatihan BUMDes dan jumlah desa yang mengikuti pelatihan BUMDesMa 2) Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan kerja sama antar desa (2023)	108 desa	108 Desa	108 Dokumen	108 Dokumen	1	108 Dokumen	108 Dokumen	100 %
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa secara serempak	-	-	14 desa	14 desa	1	-	-	-
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen penyusunan profil desa	108 Dokumen	108 Dokumen	108 Dokumen	108 Dokumen	1	108 Dokumen	108 Dokumen	100 %
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan						108 Dokumen	108 Dokumen	100 %

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 %	100 %	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk. Daerah Kab./Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama salam Daerah Kab./kota	1) Jumlah lembaga pemberdayaan desa 2) Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa (2023)	108 lembaga	108 lembaga	108 Lembaga	108 Lembaga	1	108 Lembaga		

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode	Urusan/Bid./Urusan Pemda Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DP3APMD Tahun 2018-2022) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan Kegiatan Renja DP3APMD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja DP3APMD Tahun 2023	Realisasi Renja DP3APMD Tahun 2023	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.05.2.01.09	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kel. (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel. Dan Masyarakat Hukum Adat	1) Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan jumlah pengurus lembaga LPMD/Kelurahan 2) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	108 Lembaga	108 Lembaga	108 Lembaga	108 Lembaga	1	-		
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatn Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatn teknologi tepat guna	-	-	-	-	-	108 Laporan	108 Laporan	100 %
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	-	-	-	-	-	108 Dokumen	108 Dokumen	100 %

Sumber : DPA Tahun 2022, 2023 dan 2024, ; SubBagian Perencanaan dan Program DP3APMD Kab. Buol

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buol

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan public dan standar operasional baku (standart Operasionla Procedure/SOP) masing-masing bidang pelayanan.

Pencapaian kinerja harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Dengan harapan dapat menghasilkan pelayanan yan prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buol

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra Dinas PMD				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	-	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,44	48,26	48,73	49,18	50,20	-	48,73	49,18	
3	Indeks Desa Membangun (IDM)	-	Indeks Desa Membangun (IDM)	Ds. Brk. =58 Ds.Mj=44 Ds.Mnd=6	Ds. Brk. =53 Ds.Mj=49 Ds.Mnd=6	Ds. Brk. =51 Ds.Mj=50 Ds.Mnd=7	Ds. Brk. =49 Ds.Mj=51 Ds.Mnd=8	Ds. Brk. =63 Ds.Mj=39 Ds.Mnd=6	-	Ds. Brk. =51 Ds.Mj=50 Ds.Mnd=7	Ds. Brk. =49 Ds.Mj=51 Ds.Mnd=8	
4	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbina	-	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbina	100 BUMDes	102 BUMDes	105 BUMDes	108 BUMDes	102 BUMDes	-	105 BUMDes	108 BUMDes	

Sumber : Renstra Tahun 2023-2026; SubBagian Perencanaan dan Program DP3APMD Kab. Buol

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol

2.3.1 Tingkat Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Buol

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kinerjanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol melaksanakan tugasnya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan daerah dibidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pembinaan Pemerintah Desa dan BPD melalui bimtek aparatur pemerintah desa guna peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, bimtek pengelolaan keuangan desa dan pelatihan pengelolaan asset desa, serta pembinaan administrasi desa dengan kelompok sasaran aparatur desa;
- b) Fasilitasi Penataan Desa dengan memberikan fasilitasi tata wilayah desa juga sarana dan prasarana desa;
- c) Pedoman penyusunan profil desa;
- d) Pembinaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, dengan sasaran seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Buol
- e) Pembinaan kelembagaan masyarakat dan lembaga adat masyarakat dengan sasaran kelembagaan masyarakat dan lembaga adat masyarakat;
- f) Pelayanan pendirian BUMDes dan BUMDesMa dengan memberikan sosialisasi dengan kelompok sasaran desa.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain :

- a) Terbatasnya SDM yang ada di Dinas PMD Kabupaten Buol baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas PMD Kabupaten Buol;
- b) Bumdes yang terbentuk sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dengan kegiatan usaha yang relatif terbatas pula;
- c) Kepengurusan BUMDes sebagian besar masih menggunakan dinasti kekeluargaan;
- d) Masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen dan tata kelola BUMDes dan BUMDESMA;
- e) Rendahnya sumber daya aparatur desa dan pengurus lembaga masyarakat perdesaan serta kurangnya pelatihan dan bimbingan bagi aparat desa; serta
- f) Sulitnya akses internet dan informasi bagi masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan.

Sementara permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya antara lain :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal;
- 2) Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 3) Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 4) Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;

- 5) Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat;
- 6) Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa;
- 8) Belum tersedianya data potensi desa dan Kelurahan yang komprehensif;
- 9) Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi;
- 10) Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan;
- 11) Belum optimalnya penggalan dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa;
- 12) Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA local;
- 13) Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi;
- 14) Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- 15) Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan;
- 16) Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif;
- 17) Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 18) Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan;
- 19) Belum tersedianya tanah kas Desa;

- 20) Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 21) Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 22) Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
- 23) Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 24) Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan;

Selain itu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Dinas PMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain :

- 1) Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
- 2) Tingkat pemahaman aparaturnya pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- 3) Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- 5) Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- 6) Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- 7) Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, ditetapkan Visi Kabupaten Buol yang menjadi prioritas yaitu :

- a) Membangun struktur ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan berdaya saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan;
- b) Membangun Sumber Daya Manusia unggul berkarakter dan harmonisasi sosial yang kondusif; dan
- c) Membangun layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Buol berada pada Visi pertama yaitu Membangun struktur ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan berdaya saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan. Tujuan dari Visi Pertama pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan.

Dampak dari pencapaian Visi Kepala Daerah adalah :

- 1) Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.
- 2) Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan minim peningkatan
- 3) Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat tidak terealisasi yang mana hal ini sangat menentukan penilaian

masyarakat tentang pelayanan dari aparaturnegara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol.

Tantangan :

- 1) Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
- 2) Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.
- 3) Kualitas SDM belum optimal.
- 4) Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- 5) Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- 6) Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- 7) Masih perlunya pengembangan pembangunan Desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan pembangunan antar Desa.
- 8) Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.

Peluang :

- 1) Jumlah sumber daya manusia yang memadai
- 2) Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
- 3) Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.
- 4) Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi berupa :
 - ✚ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - ✚ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - ✚ Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
 - ✚ Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bumdesa.
 - ✚ Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas PMD Kabupaten Buol menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat desa menuju desa yang mandiri dalam berbagai aspek, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Buol antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM pengelola pemberdayaan

- masyarakat dan pemerintahan desa melalui pembinaan oleh Dinas PMD Kabupaten Buol secara terus menerus sebagai kewenangannya ditingkat desa dan kecamatan;
- 2) Pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam berpartisipasi dan aktif turut serta mengembangkan desanya;
 - 3) Fasilitasi dan pendampingan data profil desa (prodeskel) secara kontinyu setiap periodenya agar desa tetap konsisten dalam pemutakhiran datanya;
 - 4) Pokja profil desa dan kelurahan serta tim evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat kabupaten dan kecamatan dalam rangka pengentasan desa-desa tidak berkembang;
 - 5) Stimulan yang dapat mendorong desa dalam melakukan identifikasi dan pengembangan potensi dan unggulan desanya serta pengelolaannya yang selanjutnya berselaras terhadap pembentukan dan pengembangan BUMDes yang baik sehingga lebih jauh dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar (kawasan desa);
 - 6) Pendampingan penguatan kelembagaan lembaga-lembaga secara prasarana ekonomi desa, pengelolaan SDA dan inovasi Teknologi Tepat Guna;
 - 7) Keberadaan dan diseminasi produk hukum terkait pengelolaan ekonomi pedesaan baik sarana prasarana, kelembagaan, penguatan modal dan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya;
 - 8) Keselarasan pengelolaan keuangan didesa melalui sistem keuangan desa (siskeudes); dan
 - 9) Sinergitas dalam koordinasi lintas perangkat daerah ditingkat kabupaten dalam mendampingi pengelolaan pembangunan didesa (verifikasi, evaluasi perencanaan,

pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban) yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025, program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian utama pemerintah Kabupaten Buol dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, adat istiadat, infrastruktur desa, transportasi desa dan perekonomian yang berbasis potensi lokal (sumber daya desa).

Program dan kegiatan sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program dan kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPD 2023-2026 dan Renstra DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Buol	Cakupan Layanan Perkantoran	100 %	4.415.678.032	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Buol	Cakupan Layanan Perkantoran	100 %	4.415.678.032	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Buol	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	12 Dokumen	3.996.290.703	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Buol	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	12 Dokumen	3.996.290.703	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	3.984.930.703	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	3.984.930.703	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.360.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.360.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Buol	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan	12 Dokumen	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Buol	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan	12 Dokumen	-	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Perkantoran	12 Dokumen	-	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Perkantoran	12 Dokumen	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	118.556.962	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	118.556.962	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Buol	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	1 Paket	1.047.775	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Buol	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	1 Paket	1.047.775	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Buol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	2 Paket	12.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Buol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	2 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Buol	Jumlah Paket Peralatan RUMah Tangga yang di Sediakan	10 Paket	1.573.188	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Buol	Jumlah Paket Peralatan RUMah Tangga yang di Sediakan	10 Paket	1.573.188	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buol	Jumlah Bahan Paket Logistik Kantor yang di Sediakan	6 Paket	25.724.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buol	Jumlah Bahan Paket Logistik Kantor yang di Sediakan	6 Paket	25.724.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Barang Penggandaan	Kab. Buol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan	15 Paket	17.482.099	Penyediaan Barang Cetak dan Barang Penggandaan	Kab. Buol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di Sediakan	15 Paket	17.482.099	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	60.729.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	60.729.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Buol	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	305.757.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Buol	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	305.757.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	12 Laporan	69.737.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	12 Laporan	69.737.500	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buol	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	3 Laporan	4.260.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buol	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	3 Laporan	4.260.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	12 Laporan	231.760.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	12 Laporan	231.760.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Buol	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	50 Unit	36.247.250	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Buol	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	50 Unit	36.247.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Buol	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajaknya	6 Unit	5.770.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Buol	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajaknya	6 Unit	5.770.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	30.477.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	30.477.250	
II	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Kab. Buol	Cakupan Kerja sama antar Desa	108 Desa	4.200.00	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Kab. Buol	Cakupan Kerja sama antar Desa	108 Desa	4.200.00	

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Buol	Jumlah Desa yang difasilitasi kerja samanya	108 desa	4.200.00	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Kab. Buol	Jumlah Desa yang difasilitasi kerja samanya	108 desa	4.200.00	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	4.200.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	4.200.000	
III	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Buol	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa	108 Desa	38.019.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Buol	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa	108 Desa	41.712.632	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Buol	Dokumen Administrasi Desa	108 Dokumen	41.712.632	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Buol	Dokumen Administrasi Desa	108 Dokumen	41.712.632	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1.532.632	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1.532.632	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	108 Dokumen	9.863.750	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	108 Dokumen	9.863.750	

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	108 Dokumen	9.996.250	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	108 Dokumen	9.996.250	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	108 Dokumen	9.950.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	108 Dokumen	9.950.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	108 Dokumen	10.370.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Buol	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	108 Dokumen	10.370.000	
IV	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Buol	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	100 %	1.060.000.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Buol	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	100 %	1.060.000.000	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk. Daerah Kab./Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama salam Daerah Kab./kota	Kab. Buol	Jumlah Desa yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan lembaga adat desanya	108 Desa	1.060.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk. Daerah Kab./Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama salam Daerah Kab./kota	Kab. Buol	Jumlah Desa yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan lembaga adat desanya	108 Desa	1.060.000.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Buol	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga	10 Dokumen	1.060.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Buol	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga	10 Dokumen	1.060.000.000	
	Total				5.562.765.047					5.562.765.047	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RKPD Kabupaten Buol Tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (*Bottom Up Planing*) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol. Disamping itu usulan program/kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang terintegrasi tingkat kecamatan (pola penyamaan misi dengan program dan jaring aspirasi masyarakat dari konstituen DPRD Kabupaten Buol) yang kemudian dilanjutkan Musrenbang tingkat kabupaten tetapi sebelumnya dibahas di forum OPD.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Buol	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Rp 30.000.000	Pelatihan PKK
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk. Daerah Kab./Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama salam Daerah Kab./kota	Kabupaten Buol	Jumlah Desa yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan lembaga adat desanya	Rp 30.000.000	Pelatihan PKK
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Buol	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga	Rp 30.000.000	Pelatihan PKK

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merupakan tahapan pembangunan jangka menengah pertama dalam mencapai sasaran visi Indonesia emas 2045. Tema dan arah RPJMN 2025-2029 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi yaitu

- 1) Transformasi Sosial :
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan social
- 2) Transformasi Ekonomi :
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja
- 3) Transformasi Tata Kelola :
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
Memperkuat ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 mengusung tema

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Hal ini karena tahun 2025 sebagai awal dari RPJMN 2025-2029 dan menjadi sangat strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2025-2045.

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJMN 2005-2025 dengan RPJMN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045d dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 (lima) Tahunan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan diseluruh Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Sementara itu Tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi : Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energy, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif Berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol

Dalam mendukung Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025 mengacu pada Fokus yang terkait dengan

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu misi pertama “Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu Mengungkit Produktifitas Sektor Unggulan Berdaya Saing dan Memperkuat Ketahanan Lingkungan Berkelanjutan.”

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol berdasarkan Peraturan Bupati Buol tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	Meningkatnya Lapangan dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	Indeks Pemberdayaan Perempuan

Sumber: Indikator Kinerja Kabupaten Buol Tahun 2023-2026; Bappeda-Litbang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut diatas kemudian dijabarkan kedalam Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol untuk menjadi barometer kinerja perangkat daerah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target per Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Membentuk Keluarga Kecil Berkualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	-	47,44	48,26
2. Meningkatkan Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Ds.Br=58 Ds. Mj=44 Ds. Mnd=6	Ds.Br=53 Ds. Mj=49 Ds. Mnd=6	Ds.Br=51 Ds. Mj=50 Ds. Mnd=7	Ds.Br=49 Ds. Mj=51 Ds. Mnd=8
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbina	91 BUMDes	98 BUMDes	100 BUMDes	102 BUMDes

Sumber: Renstra Dinas P3APMD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2025 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan DP3APMD Kabupaten Buol Tahun 2025 dijabarkan dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Buol

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catata Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				5.562.765.047				1.005.680.133.390
2	13				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Perkantoran	Kab. Buol	100 %	4.415.678.032	DAU, DBH		100 %	4.862.729.231
2	13	01	2	01	Perencanaan, Pengangara dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan	Kab. Buol	-	-	DBH		7 Dokumen	6.000.000
2	13	01	2	01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Kab. Buol	-	-	DBH	7 Dokumen	5.000.000
2	13	01	2	01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang di Ampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Buol		DBH		2 Dokumen	1.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

Kode					Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catata Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Kab. Buol	12 Dokumen	3.996.290.703	DAU, DBH	12 Bulanan	3.996.290.703
2	13	01	2	02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buol	39 Orang/Bulan	3.984.930.703	DAU	39 Orang/Bulan	3.984.930.703
2	13	01	2	02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buol	12 Dokumen	11.360.000	DBH	12 Dokumen	11.360.000
2	13	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Buol	12 Dokumen	118.556.962	DBH	12 Dokumen	113.401.687
2	13	01	2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Buol	4 Paket	1.047.775	DBH	4 Paket	-
2	13	01	2	06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Kab. Buol	2 Paket	12.000.000	DBH	2 Paket	12.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

Kode						Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catata Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan	Kab. Buol	10 Paket	1.573.188	DBH		10 Paket	1.573.188
2	13	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	Kab. Buol	6 Paket	25.724.500	DBH		6 Paket	25.724.500
2	13	01	2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket dan Penggandaan yang di Sediakan	Kab. Buol	15 Paket	17.482.099	DBH		15 Paket	17.482.099
2	13	01	2	06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buol	10 Laporan	60.729.400	DBH		10 Laporan	56.621.900
2	13	01	2	08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Buol	100 Persen	305.757.500	DBH		100 Persen	425.757.500
2	13	01	2	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	Kab. Buol	12 Laporan	69.737.500	DBH		12 Laporan	69.737.500

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode						Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catata Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	01	2	08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Kab. Buol	3 Laporan	4.260.000	DBH		3 Laporan	4.260.000
2	13	01	2	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	Kab. Buol	12 Laporan	231.760.000	DBH		12 Laporan	351.760.000
2	13	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Kab. Buol	50 Unit	36.247.250	DBH		50 Unit	36.247.250
2	13	01	2	09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajaknya	Kab. Buol	6 unit	5.770.000	DBH		6 unit	5.800.000
2	13	01	2	09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Buol	6 unit	30.477.250	DBH		6 unit	30.477.250

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode						Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catata Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
		1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	03				Program Peningkatan Kerja sama Desa	Cakupan Kerja sama antar Desa	Kab. Buol	108 Desa	4.200.000	DBH		108 Desa	4.200.000
2	13	03	2	01		Fasilitasi kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	Kab. Buol	108 Desa	4.200.000	DBH		108 Desa	4.200.000
2	13	03	2	01	0003	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Buol	5 Dokumen	4.200.000	DBH		5 Dokumen	4.200.000
2	13	04				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Buol	108 Desa	41.712.632	DBH		108 Desa	1.000.032.73 6.250
2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen Administrasi Desa	Kab. Buol	108 desa	41.712.632	DBH		108 desa	1.000.032.73 6.250
2	13	04	2	01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Buol	1 Dokumen	5.820.000	DBH		1 Dokumen	2.000.000
2	13	04	2	01	0004	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Buol	108 Dokumen	8.090.000	DBH		108 Dokumen	10.370.000

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL**

Kode						Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catata Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	04	2	01	0008	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga kerja sama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Buol	108 Dokumen	9.999.000	DBH		108 Dokumen	50.000.000
2	13	04	2	01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					DBH			1.000.000.000.000
2	13	04	2	01	0011	Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang Tersusun	Kab. Buol	108 Dokumen	7.105.000	DBH		108 Dokumen	-
2	13	04	2	01	0018	Fasilitasi Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan keurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Buol	108 Dokumen	7.105.000	DBH		108 Dokumen	10.370.000
2	13	05				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Kab. Buol	100 %	1.060.000.000	DBH		100 %	1.065.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUOL

Kode						Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catata Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	05	2	05	01	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab./kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kab./kota	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Kab. Buol	108 Desa	1.060.000.000	DBH		108 Desa	1.060.000.000
2	13	05	2	05	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Buol	108 Laporan	-	DBH		108 Laporan	5.000.000
2	13	05	2	05	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kab. Buol	10 Dokumen	1.060.000.000	DAU Earmak		10 Dokumen	1.060.000.000

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RKPD Kabupaten Buol Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PMD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (Outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Buol.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Tahun Anggaran 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

- ❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Opsional atau Lapangan
- ❖ PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

❖ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan dalam Rencana Kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparaturnya maupun Perangkat Daerah itu sendiri, instansi terkait maupun partisipasi aktif masyarakat. Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku/stakeholders yang menciptakan pemerintahan yang baru sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya kebawah, sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil tersebut benar-benar dikedepankan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada Bab-bab terdahulu, bahwa seluruh Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dilaksanakan secara konsistren. Tahun 2025 selain menjadi tahap lanjutan dari tahap-tahap sebelumnya, juga merupakan tahap pementapan, penguatan serta penajaman terhadap program dan kegiatan prioritas yang telah dilakukan sebelumnya dan yang jauh lebih penting dari itu, Tahun 2025 akan menjadi embrio terhadap hasil-hasil pembangunan yang dicapai dari penyelenggaraan pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalam

Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahunnya dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD antara lain :

- 1) Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
- 2) Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerja sama yang sinergis.

Rencana Kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol untuk mewujudkan Good Governance dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol. Rencana Kerja yang dilaksanakan selama satu tahun diharapkan juga bisa menjadi acuan dalam memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja dimasa yang akan datang oleh pimpinan Perangkat Daerah maupun staf dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimas yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian dari setiap program dan kegiatan setiap tahunnya.

Buol, 16 Juli 2024



ABD. YANI L. SAAD, S.Sos
NIP. 19651017 198303 1 017